

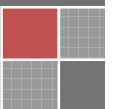
2011

LAPORAN TAHUNAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN MILITER DAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA**



Pengantar

Sehubungan dengan Penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun anggaran 2011, Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun anggaran 2011 telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan DIPA /RKAKL Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer yang diperoleh pada tahun 2011.

A. Pembinaan Sumber daya Manusia :

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada prinsipnya untuk mewujudkan visi dan Misi Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Blue Print Mahkamah Agung RI , maupun visi dan Misi Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara., dalam pembinaan bidang Sumber Daya Manusia, Ditjen Badilmiltun dapat dikatakan lebih complicated, terutama pembinaan SDM dilingkungan Peradilan Militer dimana dalam proses rekrutmen, mutasi maupun promosi masih harus melibatkan Markas Besar TNI, sehingga pada kegiatan ini terkadang waktu yang dibutuhkan sulit untuk diprediksi. Sehingga untuk mengatasi beban kerja yang ada terutama di lingkungan peradilan Militer, dilakukan koordinasi antara Pengadilan Militer yang satu dengan Pengadilan Militer yang lain.

B. Pembinaan Administrasi Peradilan :

Dalam bidang pembinaan administrasi peradilan, baik dilingkungan Peradilan Militer maupun lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dasar pelaksanaan Pembinaan didasarkan pada Pola Bindalmin yang ada. Tujuan dan sasaran dari kegiatan pembinaan yang dilaksanakan selama ini adalah agar terjadinya peningkatan penyelesaian putusan/tunggakan perkara yang ada dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Keadaan Perkara

Sesuai dengan target yang direncanakan dalam Renstra 2010-2014 Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara , pada tahun anggaran 2011 ditargetkan dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama maupun tingkat banding) dapat menyelesaikan 5100 Perkara, dari hasil monitoring dan evaluasi target tersebut dapat tercapai, karena pada tahun anggaran 2011, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah dapat menyelesaikan sebanyak 5469 perkara , dengan demikian telah terjadi kelebihan target sebesar 5469 perkara – 5100 perkara = 369 perkara atau 6,84%.

D. Tranparansi Peradilan

Untuk mendukung tranparansi Peradilan, Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, selalu memberikan informasi pada masyarakat/publik yang membutuhkan baik secara langsung maupun melalui website yang dimiliki Ditjen

Badilmiltun, walaupun masih sangat sederhana tapi tetap dapat dipegunakan untuk member informasi pada masyarakat.

E. Teknologi Informasi

Sarana teknologi informasi yang ada di Ditjen Badilmiltun untuk tahun 2011 ini dapat dikatakan masih sangat minim, namun demikian tetap masih dapat dipergunakan, dan pada tahun 2012 Ditjen Badilmiltun walau dengan keterbatasan Anggaran yang ada, tetap akan berusaha mengembangkan dan mengintegrasikan beberapa aplikasi yang ada di Mahkamah Agung RI dengan aplikasi yang akan diadakan di Ditjen Badimiltun.

F. Agenda Pembaharuan

Menyikapi agenda pembaharuan dan reformasi birokrasi yang tengah berjalan, Direktorat jendral badan Peradilan Militer disamping berupaya menerapkan keterbukaan informasi sebagaimana dikemukakan diatas, beberpa kegiatan terkait dengan agenda pembaharuan dan reformasi birokrasi juga tekah dilakukan, seperti misalnya penyempurnaan SOP, himbauan moral baik secara langsung maupun melalui website Ditjen badilmiltun, serta pengawasan yang bertujuan mengihndari KKN pada Direktorat Jendral Badan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, maupun diliungkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, walaupun harus beresiko diberikannya punishment berupa usulan pemberian hukuman disiplin pada unit kerja yang berwenang memberi hukuman disiplin, baik ditingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling berat..

Demikian bahan laporan Tahunan ini semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.

Jakarta, Januari 2012
Dirjen Badilmiltun

(Sulisty, SH. Mhum)

Daftar isi

	Hal.
A. Agenda Pembaharuan :.....	1
B. Reformasi Birokrasi :.....	3
C. Visi dan Misi Ditjen Badilmiltun :	5
D. Rencana Strategis :	6
E. Sumber Daya Manusia :	7
F. Pembinaan SDM Teknis Yudisial :	14
G. Keadaan Perkara :	26
H. Pengelolaan Keuangan :	35

A. AGENDA PEMBAHARUAN

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada, pada tahun anggaran 2011 melaksanakan program dan kegiatan pembaharuan guna menunjang visi Mahkamah Agung RI “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung**” dengan menekankan pada setiap program atau kegiatan harus dilaksanakan secara:

1. **Profesional :**

Menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan berupa penyelenggaraan pelayanan lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang efektif, efisien, mandiri dan berwibawa.

Dukungan dan pelaksanaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara professional seperti misalnya :

- Program Pembinaan Teknis administrasi Peradilan dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, maupun dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- Program Monitoring dan Evaluasi bagi lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, melalui kegiatan penelitian data sekunder laporan keadaan perkara setiap 3 bulan, maupun kunjungan on the spot lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. **Tertib:**

Menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan berupa terlaksananya pelayanan administrasi yang tertib didasarkan pada suatu mekanisme kerja yang pasti dan dapat menjadi panduan setiap kegiatan pelayanan administrasi untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Disiplin sumber Daya Manusia yang ada dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan tata Usaha Negara maupun Sumber Daya Manusia yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara juga juga mendapat perhatian utama, hal ini dilakukan karena baik buruknya kinerja satu unit kerja akan sangat tergantung pada tingkat kedisiplinan sumber daya manusianya.

3. **Transparan :**

Menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan dapat terselenggara pelayanan administrasi peradilan yang terbuka dan akuntabel, atau dengan kata lain setiap penyelenggaraan kegiatan yang bersifat pelayanan publik atau pencari keadilan harus dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diketahui oleh publik, khususnya para pencari keadilan. Untuk lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tranparansi diwujudkan melalui pemberian informasi kepada pencari keadilan tentang tata cara beracara di Pengadilan Militer maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara..

Transparansi juga dterapkan dalam bidang administrasi umum, khususnya menyangkut pertanggung jawaban pemakaian Anggaran Belanja Negara. kegiatan ini diwujudkan melalui paparan Pagu anggaran setiap satker yang dapat dilihat oleh public melalui situs/website yang dimiliki oleh masing2 satker dilingkungan Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Badan peradilan yang berada dibawahnya.

Publik dapat mengakses, informasi perkara maupun pengaduan melalui konten yang tersedia dilingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara, walau situs Ditjen Badilmiltun untuk saat ini masih sering mengalami gangguan hal ini dianstisipasi melalui beberapa sarana informasi yang ada saat ini. Apabila situs www.ditjenmiltun.net mengalami gangguan pengaduan juga dapat dilakukan melalui portal www.ditjenmiltun.info . pada tahun 2012 Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan melakukan penyimpanan Sever di Mahkamah Agung RI, hal ini dilakukan disamping untuk melakukan efesiensi anggaran juga untuk menghindari gangguan-gangguan yang selama ini sering dialami oleh Ditjen Badilmiltun dalam melaksanakan kegiatan tranparansi keuangan maupun tranparansi yang lain.

B. Reformasi Birokrasi

Di Direktorat jendral Badan Peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara.

1. Program Penataan manajemen sumber daya manusia

Penataan manajemen sumber daya manusia di Direktorat Jendral Badan peradilan Militer dan Peradilan tata Usaha Negara serta peradilan dibawahnya dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Penyusunan peta jabatan dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk tahun anggaran 2011 ini telah disusun peta kekuatan sumber daya manusia dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta dilikungan Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Berdasarkan hal tersebut diatas Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer dan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata usaha Negara serta Sekretariat Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menempatkan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kompetensi Sumber Daya Manusia Manusia tersebut juga didasarkan pula pada Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut.
- c. Promosi dan Mutasi di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga telah dilaksanakan baik untuk lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara maupun untuk lingkungan internal di Direktorat jendral Badan Peradilan Militer dan Peraduilan Tata Usaha Negara sendiri.
- d. Kegiatan lanjutan dari pembuatan staffing asisgment yang pernah dilakukan sebelumnya, juga ditindak lanjuti dengan pembuatan Draft Standar Olperasional atau mekanisme kerja di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada Tahun Anggaran 2011, sedang dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi draft Standar Operasional tersebut, dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2012.

2. Program Pengembangan Teknologi Informasi

Teknologi informasi di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun anggaran 2011 masih dalam tahap peningkatan sumber daya manusia, terutama dalam mengelola situs/ website Ditjen badilmiltun. Secara umum dapat dikatakan berjalan, namun demikian karena keterbatasan Bandwich yang dimiliki oleh Situs maupun

Portal ditjen badilmiltun, maka ketika hit runs sudah terlampaui banyak maka situs/website Ditjen Badilmiltun menjadi sulit untuk dibuka, sehingga pada tahun anggaran 2012 akan diupayakan adanya peningkatan bandwidth dari Situs/website ditjen badilmiltun guna lebih meningkatkan pelayanan kepada public.

Pemanfaatan server yang dimiliki oleh Ditjen Badilmiltun pada tahun anggaran 2011 ini dapat dikatakan masih kurang sekali, hal ini dapat terjadi demikian karena anggaran yang tersedia untuk melakukan pelatihan masih menjadi satu dengan anggaran pelatihan operator website, sehingga materi yang diberikan untuk pelatihan/pendalaman server milik Ditjen Badilmiltun masih sangat minim. Namun demikian konsep learning by doing masih tetap dilakukan, walaupun kadang membuat situs/website Ditjen Badilmiltun menjadi agak terganggu penayangannya.

Selain dari pada itu untuk bulan desember ini situs/website ditjen badilmiltun sedang mengalami gangguan, mengingat biaya pemeliharaan saat ini tidak ada, maka tim IT Ditjen Badilmiltun sedang berupaya membersihkan gangguan yang terjadi pada situs Ditjen Badilmiltun. Namun demikian seperti telah diutarakan dimuka, untuk mengantisipasi gangguan yang dialami oleh situs yang dimiliki oleh Ditjen Badilmiltun pada tahun 2012 akan diupayakan penyimpanan server di Mahkamah Agung.

C. Visi dan Misi Direktorat Jendral Badilmiltun

1. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun 2010-2014

Pada tahun anggaran 2010 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara juga telah membuat Draft Visi dan Misi untuk tahun 2010-2014.

a. Visi :

Pada dasarnya visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah sebagian dari visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk itu dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014, visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan adalah *"terwujudnya Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang Agung"*.

b. Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- 1). meningkatkan profesionalisme aparatur Ditjen Badilmiltun serta tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
- 2). meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkara dan administrasi fasilitatif pada Ditjen Badilmiltun dan Badan Peradilan Militer serta Peradilan Tata Usaha Negara
- 3). meningkatkan standarisasi pranata dan tata laksana perkara pidana Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
- 4). meningkatkan sarana dan prasarana, organisasi dan administrasi fasilitatif Ditjen Badilmiltun, Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

D. Rencana Strategis

Dalam rangka mencapai apa yang menjadi visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melakukan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

1. Rencana Jangka Panjang

Visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas merupakan Rencana jangka panjang dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

2. Rencana Jangka Menengah

Rencana jangka menengah merupakan rencana program dan kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara periode tahun 2010 s.d 2014.

a. Tujuan :

Tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2010 – 2014 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan uraian sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Aparatur/Tenaga Teknis Peradilan Militer dan *Peradilan Tata Usaha Negara yang Profesional*.
2. Kegiatan Peningkatan Administrasi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang modern.
3. Kegiatan Peningkatan Standarisasi penelaahan berkas perkara Pidana Militer dan perkara Tata Usaha Negara.
4. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana, organisasi dan administrasi

Program dan kegiatan yang berlangsung selama ini, bertitik tolak pada tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang melaksanakan pembinaan untuk lingkungan peradilan militer dan Tata Usaha Negara. Kegiatan pembinaan yang telah berlangsung pada tahun 2010, telah dilaksanakan untuk beberapa lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Kegiatan tersebut berupa orientasi wawasan kepemimpinan untuk tenaga teknis dilingkungan peradilan militer dan tata usaha Negara, dan pada prinsipnya dilaksanakan untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Pimpinan Mahkamah

agung RI. Target penyelesaian putusan/perkara untuk lima tahun (2010-2014) adalah sebesar 25.000 perkara, dengan demikian target yang harus dicapai adalah penyelesaian perkara sebesar 5100. Perkara.

Sampai pada akhir bulan November 2011 penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara sebesar 5469 perkara, sedang Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Militer dan Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara menyelesaikan perkara sebesar 1660 perkara. Jumlah Total Penyelesaian Perkara dari Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Militer serta Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara berjumlah 5469 perkara + 1660 perkara = 7.129 perkara. Bila dikaitkan dengan target penyelesaian perkara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja yang tertera dalam rencana strategis Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat kelebihan 1.729 perkara atau terjadi peningkatan penyelesaian perkara sebesar 33,90 %

Bila dikaitkan dengan jumlah putusan yang dihasilkan oleh lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, putusan yang dihasilkan oleh lingkungan Peradilan Militer dalam Tahun anggaran 2011 adalah sebesar 5469, sedang target seperti yang dikemukakan diatas adalah sebesar 5100 perkara, maka ada peningkatan sebesar 5469 perkara – 5100 perkara = 349 perkara, berarti ada peningkatan kinerja sebesar $349/5100 = 6,84$ %.

E. Sumber Daya Manusia .

Sumber Daya Manusia yang ada pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdiri dari sumber Tenaga Teknis Yudisial (Hakim Panitera dan Jusurita) dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial (Pegawai Negeri Sipil). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Sumber Daya Manusia yang ada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Jumlah Sumber Daya Manusia dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada tahun 2011 dapat diuraikan sebagai berikut

1. JUMLAH SDM DILINGKUNGAN DITJEN BADILMILTUN

STRUKTURAL					FUNGSIONAL	STAF	J.KELAMIN		JUMLAH KESELURUHAN
ESELON							L	P	
I	II	III	IV	JUMLAH					
1	5	15	45	66	Nihil	37	65	38	103

2. JUMLAH SDM DITJEN BADILMILTUN BERDASARKAN GOLONGAN

GOLONGAN	IV/E	IV/D	IV/C	IV/B	IV/A	III/D	III/C	III/B	III/A	II/D	II/C	II/B	II/A	IB	IA
JUMLAH	-	4	2	12	13	21	15	7	12	-	9	-	2	-	-

GOLONGAN	SERTU	SERDA	PRATU
JUMLAH	1	3	2

3. JUMLAH SDM DITJEN BADILMILTUN BERDASARKAN PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	S2	S1	SM	D3	SMU
JUMLAH	31	47	2	10	13

4. JUMLAH SDM DITJEN BADILMILTUN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

JENIS KELAMIN	
LAKI-LAKI	PEREMPUAN
65	38

5. JUMLAH SDM DITJEN BADILMILTUN BERDASARKAN LOKASI/ TEMPAT KERJA

A. YANI KAV. 58		MERDEKA UTARA	
LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
50	24	15	14

6. Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Militer :

Jumlah Hakim dilingkungan Peradilan Militer secara keseluruhan berjumlah 105 orang, dengan rincian 14 orang di Peradilan Militer Tingkat Banding dan 10 Orang di Peradilan Militer Tingkat Pertama bagi terdakwa berpangkat Mayor keatas dan 91 Orang bagi terdakwa yang berpangkat kapten kebawah. Pengadilan Militer memang berbeda dengan Peradilan lainnya, karena peran Pengadilan Militer Tinggi dapat menjadi peradilan tingkat pertama bagi terdakwa yang berpangkat mayor keatas dan Pengadilan tingkat banding bagi terdakwa yang berpangkat kapten kebawah, sedang pengadilan tingkat banding bagi terdakwa yang berpangkat mayor keatas ada pada Pengadilan Militer Utama.

No.	PENGADILAN	HAKIM		PANI TERA		PEGAWAI				Jumlah	
		P	W	P	W	MILITER		PNS		P	w
						P	W	P	W		
1	Militer Utama	3	0	4	1	13	2	10	3	30	6
2	Milti I Medan	4	0	5	0	6	0	6	7	21	7
3	Milti II Jakarta	1	1	2	4	5	0	7	4	15	9
4	Milti III Surabaya	4	1	3	1	5	0	7	5	19	7
Jumlah		12	2	14	6	29	2	30	19	85	29
5	Mil I-01 B. Aceh	4	0	2	0	3	0	4	2	13	2
6	Mil I-02 Medan	1	2	2	0	0	3	6	2	15	4
7	Mil I-03 Padang	3	1	2	0	3	0	3	4	13	5
8	Mil I-04 Palembang	6	1	2	0	3	0	8	4	19	4
9	Mil I-05 Pontianak	4	1	3	0	4	0	8	4	19	5
10	Mil I-06 Banjarmasin	5	0	2	0	3	0	7	2	17	2
11	Mil I-07 Balikpapan	2	1	2	0	2	0	2	3	8	4
12	Mil II-08 Jakarta	7	0	6	1	6	2	8	5	27	8
13	Mil II-09 Bandung	7	1	3	1	4	0	10	7	24	9
14	Mil II-10 Semarang	3	1	1	0	8	0	10	6	22	7
15	Mil II-11 Yogyakarta	5	1	4	0	11	0	9	1	29	2
16	Mil III-12 Surabaya	7	1	2	2	5	0	3	6	17	9
17	Mil III-13 Madiun	3	1	3	0	3	0	7	3	16	4
18	Mil III-14 Denpasar	4	0	2	0	4	0	7	3	17	3
19	Mil III-15 Kupang	3	0	2	0	1	0	5	4	11	4
20	Mil III-16 Makassar	6	1	1	4	4	2	6	6	18	10
21	Mil III-17 Manado	4	0	1	0	1	0	5	3	11	3
22	Mil III-18 Ambon	4	0	2	0	2	0	8	2	16	2
23	Mil III-19 Jayapura	2	0	2	0	2	0	9	3	15	3
24	Pengawasan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	MA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		95	13	58	11	107	6	155	89	415	119

Keterbatasan Sumber Daya Manusia/Tenaga Teknis Peradilan militer memang merupakan hambatan dalam penyelesaian perkara yang ada dilingkungan Peradilan Militer. Usaha penambahan tenaga teknis dilingkungan peradilan Militer

telah diupayakan, namun karena proses pemenuhannya harus melalui Mabes TNI, maka memakan waktu yang relative sulit diprediksi. Secara keseluruhan jumlah tenaga teknis maupun non teknis dilingkungan Peradilan Militer berjumlah 534 orang dengan rincian : 415 orang pria dan 119 Wanita.

7. Jumlah SDM di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

a. Peradilan TUN Tingkat Banding

No.	PENGADILAN TINGGI TUN	HAKIM		PAN.		WP		PM		PP		JRST		Beban Perkara
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
1	Jakarta	8	2	1	0	1	0	0	2	14	12	0	0	179
2	Medan	12	0	1	0	1	0	2	0	7	5	0	9	131
3	Surabaya	5	2	1	0	1	0	1	1	16	7	0	0	84
4	Makassar	12	0	1	0	1	0	2	0	5	6	3	0	89
JUMLAH		37	4	4	0	4	0	5	3	42	3	3	0	

b. Peradilan TUN Tingkat Pertama

No.	PENGADILAN TUN	HAKIM		PAN.		WP		PM		PP		JRST		Beban Perkara
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
1	Jakarta	11	1	1	0	1	0	0	2	11	15	2	2	164
2	Bandung	8	5	1	0	1	0	1	1	13	8	0	0	80
3	Banjarmasin	5	5	1	0	1	0	2	0	1	4	1	3	17
4	Pontianak	8	2	1	0	0	1	0	2	9	0	4	4	28
5	Samarinda	8	2	1	0	1	0	1	1	4	1	1	1	26
6	Palangkaraya	7	3	1	0	1	0	1	1	1	3	1	0	8
7	Medan	6	6	1	0	1	0	0	2	11	10	3	1	68
8	Banda Aceh	6	2	1	0	1	0	2	0	6	1	3	0	25
9	Padang	11	1	1	0	1	0	1	1	6	4	2	0	26
10	Pekanbaru	8	4	1	0	1	0	0	2	6	0	1	0	25
11	Jambi	7	3	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	10
12	Bengkulu	6	4	1	0	1	0	1	1	2	2	2	0	7
13	Palembang	8	2	1	0	1	0	1	1	4	11	5	0	31
14	Bdr. Lampung	7	3	1	0	1	0	0	2	2	6	2	0	16
15	Surabaya	11	5	1	0	1	0	2	0	13	8	2	3	84
16	Semarang	7	5	1	0	1	0	0	2	11	10	3	2	78
17	Yogyakarta	4	5	0	1	1	0	1	1	5	5	3	0	43
18	Denpasar	4	6	1	0	0	1	2	0	7	7	3	3	11
19	Mataram	5	6	1	0	1	0	2	0	5	2	3	3	32
20	Kupang	6	5	1	0	0	1	2	0	1	1	3	2	17
21	Makassar	7	5	1	0	1	0	1	1	12	2	4	0	43
22	Manado	10	0	1	0	1	0	1	1	12	2	4	0	29
23	Kendari	8	3	1	0	1	0	2	0	2	1	0	0	18
24	Palu	5	4	1	0	1	0	1	1	0	0	2	1	11
25	Ambon	9	1	0	1	1	0	1	1	5	2	5	1	6
26	Jayapura	8	0	1	0	1	0	1	1	3	0	0	0	34
27	Serang	5	4	1	0	1	0	2	0	0	1	0	0	
28	Tj Pinang	6	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	
JUMLAH		201	92	26	2	25	3	32	24	146	107	60	28	

F. Pembinaan Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara bertanggung jawab atas pembinaan Sumber Daya Manusia yang ada dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Dilingkungan Peradilan Militer :

Sesuai dengan rencana kegiatan tahunan dalam tahun anggaran 2011 Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer sebagai salah unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah melaksanakan kegiatan pembinaan yang diperuntukan bagi Kepala Pengadilan militer dan Kepala Panitera Peradilan militer .

Pada tahun Anggaran 2011 , Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melalui monitoring dan evaluasi , data laporan perkembangan perkara yang dikirim dari Pengadilan Militer tingkat pertama maupun Pengadilan Militer Tingkat Banding, selain dari pada itu kegiatan bimbingan teknis juga dilakukan secara langsung pada salah satu pengadilan militer secara bergiliran dengan melibatkan peserta tenaga teknis (Hakim dan Panitera) pada Pengadilan Militer dengan Nara Sumber Pimpinan Mahkamah Agung maupun kalangan Akademnis. Pada tahun anggaran 2011 ini Bimbingan Teknis administrasi maupun kegiatan lain yang bersifat pembinaan terhadap Pengadilan Militer dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Tempat	Penanggung Jawab	Peserta
1	2	3	4	
1	Penyusunan standarisasi tenaga teknis Peradilan Militer	Di Bogor	Ditbinganismin Peradilan Militer	Kadilmiltama, Dirbinganismin Peradilan Militer , Kadilmilti dan kadilmil
2	Penyusunan standarisasi tata kerja dan tata kelola Pengadilan Militer	Di Bogor	Ditbinganismin Peradilan Militer	Kadilmilti, Kadilmil dan Pejabat struktural di lingkungan Peradilan Militer
3	Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis dan Lainnya dilingkungan Peradilan Militer	Ditbinganismin Peradilan Militer	Ditbinganismin Peradilan Militer	Hakim, Panitera dan SDM Militer

4	Bimbingan Teknis Dilingkungan Peradilan Militer	Bandung	Ditbinganismin Peradilan Militer	Panitera Peradilan Militer
5	Bimbingan Kompetensi dilingkungan Peradilan Militer	Surabaya	Ditbinganismin Peradilan Militer	Hakim Peradilan Militer
6	Fit & Proper Test bagi Kepala, Wakil Kepala dan Hakim Tinggi Militer	Jakarta	Ditbinganismin Peradilan Militer	Hakim di Peradilan Militer
7	Rekrutmen Calon Hakim Militer	Bogor	Ditbinganismin Peradilan Militer	Panitera dan Kataud di Peradilan Militer
8	Pencetakan Buku Register Militer	Jakarta		

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara :

Pada tahun Anggaran 2011 , Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta koordinasi, konsultasi dan pembinaan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melalui monitoring dan evaluasi , data laporan perkembangan perkara yang dikirim dari Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Banding, selain dari pada itu kegiatan bimbingan teknis juga dilakukan secara langsung pada salah satu pengadilan Tata Usaha Negara secara bergiliran dengan melibatkan peserta tenaga teknis (Hakim dan Panitera) pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nara Sumber Pimpinan Mahkamah Agung maupun kalangan Akademnis. Pada tahun anggaran 2011 ini Bimbingan Teknis administrasi Peradilan Tata Usaha Negara telah dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dapat terlihat dalam tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Tempat	Penanggung jawab	Keterangan/ Peserta
1	2	3	4	5
1	Penyusunan standarisasi tata kerja dan tata kelola Pengadilan TUN	Bandung	Ditbinganismin Peradilan TUN	Para Ketua Pengadilan Tingkat banding
2	Penyusunan standarisasi tata kerja dan tata kelola Pengadilan TUN	Bogor	Ditbinganismin Peradilan TUN	Pejabat Struktural dan Ketua PTUN.
3	Bimbingan Teknis Dilingkungan Peradilan TUN	Jakarta	Ditbinganismin Peradilan TUN	KPTTUN dan KPTUN dilingkungan Peradilan TUN
4	Bimbingan Teknis Administrasi Dilingkungan Peradilan TUN	Bandung	Ditbinganismin Peradilan TUN	Panitera Peradilan TUN
5	Bimbingan Kompetensi dilingkungan Peradilan TUN	Bandung	Ditbinganismin Peradilan TUN	Hakim di Peradilan TUN
6	Pencetakan Buku Register TUN	Jakarta	Ditbinganismin Peradilan TUN	

b. Tenaga Teknis Peradilan Militer :

1). Jumlah Personil Hakim Militer Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk yang terdakwanya Berpangkat Mayor Keatas.:

No	PENGADILAN	PERSONIL SEKARANG	
		P	W
a. Hakim Militer Utama		P	W
		3	0
<i>Jumlah</i>		3	0
c. Hakim Militer Tinggi		P	W
1	Dilmilti I Medan	4	0
2	Dilmilti II Jakarta	1	1
3	Dilmilti III Surabaya	4	1
<i>Jumlah</i>		12	2

c. Jumlah Personil Hakim Militer Tingkat Pertama untuk Terdakwa yang Berpangkat Kapten Kebawah :

No	PENGADILAN	PERSONIL SEKARANG	
		P	W
1	Dilmil I-01 Banda Aceh	4	0
2	Dilmil I-02 Medan	1	2
3	Dilmil I-03 Padang	3	1
4	Dilmil I-04 Palembang	6	0
5	Dilmil I-05 Pontianak	4	1
6	Dilmil I-06 Banjarmasin	5	0
7	Dilmil I-07 Balikpapan	2	1
8	Dilmil II-08 Jakarta	7	0
9	Dilmil II-09 Bandung	7	1
10	Dilmil II-10 Semarang	3	1
11	Dilmil II-11 Yogyakarta	5	1
12	Dilmil III-12 Surabaya	7	1
13	Dilmil III-13 Madiun	3	1
14	Dilmil III-14 Denpasar	4	0
15	Dilmil III-15 Kupang	3	0
16	Dilmil III-16 Makassar	6	1
17	Dilmil III-17 Manado	4	0
18	Dilmil III-18 Ambon	4	
19	Dilmil III-19 Jayapura	2	
<i>Jumlah</i>		80	11

Peta kekuatan Hakim Militer pada lingkungan Peradilan Militer I sebagaimana diuraikan diatas untuk saat ini tidak sama antara Pengadilan Militer yang satu dengan Pengadilan Militer yang lainnya, hal ini dilakukan mengingat beban

kerja Pengadilan Militer saat ini tidak sama, sehingga dalam proses penempatannyapun dihitung berdasarkan kebutuhan Pengadilan Militer. Jumlah keseluruhan Hakim Militer dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Banding berjumlah 105 orang, ditambah dengan 2 Orang sebagai Hakim Pengawas dan 1 orang ditempatkan di Sekretariat Ketua Mahkamah Agung RI.

PANITERA MILITER :

No	PENGADILAN	PERSONIL SEKARANG
a. Panitera Militer Utama		5
Jumlah		5
b. Panitera Pengadilan Militer Tinggi		
1	Dilmilti I Medan	5
2	Dilmilti II Jakarta	6
3	Dilmilti III Surabaya	4
Jumlah		15
c. Panitera Pengadilan Militer		
1	Dilmil I-01 Banda Aceh	2
2	Dilmil I-02 Medan	2
3	Dilmil I-03 Padang	2
4	Dilmil I-04 Palembang	2
5	Dilmil I-05 Pontianak	3
6	Dilmil I-06 Banjarmasin	2
7	Dilmil I-07 Balikpapan	2
8	Dilmil II-08 Jakarta	7
9	Dilmil II-09 Bandung	4
10	Dilmil II-10 Semarang	2
11	Dilmil II-11 Yogyakarta	4
12	Dilmil III-12 Surabaya	4
13	Dilmil III-13 Madiun	3
14	Dilmil III-14 Denpasar	2
15	Dilmil III-15 Kupang	2
16	Dilmil III-16 Makassar	3
17	Dilmil III-17 Manado	1
18	Dilmil III-18 Ambon	1
19	Dilmil III-19 Jayapura	1
Jumlah		69

d. Kegiatan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis di lingkungan Peradilan Militer :

Dalam rangka pembinaan tenaga teknis Pengadilan Militer telah dilaksanakan mutasi dan promosi tenaga teknis Pengadilan Militer untuk anggota, Hakim dan Panitera sebanyak orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Kadilmilti	1	
2	Kadilmil	4	
3	Wakadilmil	5	
4	Hakim Tinggi	6	
5	Hakim	15	
5	Panitera	12	
6	Kataud	2	
7	Kaur	3	
8	Jumlah Total	48	

e. Kenaikan Pangkat Hakim di Peradilan Militer

No	Pangkat		Jumlah
	Lama	Baru	
1	Letkol	Kolonel	1
1	Mayor	Letkol	5
2	Kapten	Mayor	4

f. Pengangkatan Hakim Militer

g. Kenaikan Pangkat Panitera di Peradilan Militer

No	Pangkat		Jumlah
	Lama	Baru	
1	Mayor	Letkol	2
2	Kapten	Mayor	2
3	Lettu	Kapten	2
4	Letda	Lettu	2
5	Peltu	Letda	2
6	Serma	Pelda	3

a. Kenaikan Pangkat Tenaga non teknis di Peradilan Militer

No	Pangkat		Jumlah
	Lama	Baru	
1	Serka	Serma	3
2	Sertu	Serka	1
3	Serda	Sertu	3
4	Praka	Kopda	4
5	Pratu	Praka	1

b. Mutasi dan Promosi SDM Militer Tenaga Non Teknis

No	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Serka	12	
2	Sertu	11	1 orang di Dilmiltama
3	Serda	12	
4	Kopda	4	
5	Klk Ttu	4	

c. Tenaga Teknis Peradilan Militer yang Purnabakti Tahun 2011

No	Pangkat	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	kolonel	Hakim Militer Tinggi	2	
2	Kolonel	Hakim Militer	1	

a. Tenaga Teknis Peradilan Militer yang Mendapat Hukuman Disiplin Tahun 2011

No	Pangkat	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Letkol	Hakim	2	
2	Mayor	Hakim	4	

b. Kegiatan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis dan Tenaga Non Teknis Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Ketua PTTUN	-	
2	Wk KPTTUN	-	
3	Ketua PTUN	-	
4	Wk KPTUN	-	
5	Hakim	114	22 orang diantaranya penempatan hakim baru
6	Panitera	13	
7	Wapan	6	
8	Panmud	14	
9	Pan. Pengganti	22	

a. Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang Mendapat Kenaikan Pangkat Tahun 2011

No	Jabatan	Pangkat Lama	Pangkat Baru	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Hakim	IIIa	IIIb	24 orang	
2	Hakim	IIIb	IIIc	12 orang	
3	Hakim	IIIc	IIId	12 orang	
4	Hakim	IIId	IVa	2 orang	
5	Hakim	IVa	IVb	6 orang	
6	Hakim	IVb	IVc	8 orang	
7	Hakim Tinggi	IVc	IVd	1 orang	
8	Hakim Tinggi	IVd	IVe	1 orang	

a. Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang Mengikuti Pendidikan S2 dan S3

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Hakim	3	S3
2	Hakim	11	S2
3	Cakim	9	S2
4	Panitera	3	S2
5	Wapan	2	S2
6	Panmud	1	S2
7	PP	1	S2

a. Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang Mendapat Hukuman Disiplin/lainnya tahun 2011

No	Jabatan	Jumlah	Hukuman Disiplin	Keterangan
1	Hakim Tinggi	1	Berat	Diberhentikan dng tidak hormat
2	Hakim TUN	2	Ringan	Teguran Tertulis dan pengurangan tunjangan Kinerja sebesar 75 % selama 3 bulan
3	Hakim TUN	3	Sedang	Teguran Tertulis dan pengurangan tunjangan Kinerja sebesar 90 % selama 6 bulan dan tidak boleh menangani perkara selama 6 bulan

a. Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang Purnabakti Tahun 2011

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua PTTUN Surabaya	1	Pensiun
2	Hakim Tinggi	1	Meninggal

G. KEADAAN PERKARA

A. PERKARA KASASI

1. Keadaan Perkara pada Direktorat Pranata dan Tata laksana Perkara Pidana Militer Tahun 2010

Perkara Pidana Militer	Sisa Akhir Tahun 2009	Masuk Tahun 2010	Berkas lengkap Tahun 2010	Sisa Akhir Tahun 2010
Kasasi	0	213	212	1 SM)
PK	0	9	6	3 (SM)
Grasi	0	1	1	0

2. Keadaan Perkara pada Direktorat Pranata dan Tata laksana Perkara Pidana Militer Tahun 2011 (Data sedang divalidasi)

Perkara Pidana Militer	Sisa Akhir Tahun 2010	Masuk Tahun 2011	Berkas lengkap Tahun 2011	Sisa Akhir Tahun 2011
Kasasi	2	256	257	1 (S.M)
PK	3	16	16	3 (SM)
Grasi	0	0	0	0

Pada Tahun Anggaran 2011, Jumlah Perkara masuk lebih ,banyak dibanding dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2010, beban kerja Ditpratalak Perkara Pidana Militer menjadi lebih besar dari tahun sebelumnya, dan jumlah perkara pidana militer yang lengkap juga semakin banyak. Perkara-perkara pidana militer yang telah lengkap langsung diserahkan pada Panitera Muda Pidana Militer untuk ditindak lanjuti dengan pengregisteran perkara dan pemeriksaan oleh Majelis Hakim Agung yang selanjutnya diputus oleh Majelis Hakim Agung.

3. Keadaan Perkara pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2010

Perkara TUN	Sisa Awal Tahun 2010	Masuk Tahun 2010	Ditelaah Tahun 2010	Sisa Akhir Tahun 2010
Kasasi	0	438	438	0
PK TUN	0	170	170	0
Hak Uji Materiil	0	63	63	0
PK Pajak	0	678	638	40(SM)
Uji Pendapat (khusus)	0	0	0	0
Jumlah Total	0	1349	1309	40

4. Keadaan Perkara pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2011

Perkara TUN	Sisa Akhir Tahun 2010	Masuk Tahun 2011	Berkas lengkap Tahun 2011	Sisa Akhir Tahun 2011
Kasasi	0	408	380	48
PK	0	158	151	7
Hak Uji Materiil	1	48	49	0
Sengketa Pajak	40	872	698	174
Uji Pendapat (khusus)	0	1	1	0
Jumlah Total		1396	1178	218

Ditinjau dari jumlah perkara yang ditelaah pada tahun 2010 berjumlah 1309 , sedang pada tahun 2011 jumlah perkara yang ditelaah berjumlah 1178 ditinjau dari jumlah berkas perkara yang lengkap memang nampak ada penurunan 1349 perkara – 1178 perkara = 171 perkara.

Penurunan kwantitas berkas perkara yang lengkap terjadi karena jumlah perkara yang tidak lengkap bertambah dari jumlah awal 40 menjadi jumlah keseluruhan sebanyak 178 perkara, sehingga dari sisi kelengkapan berkas ada peningkatan jumlah berkas perkara yang tidak lengkap sebesar 178 berkas perkara – 40 berkas perkara – 138 berkas perkara.

Secara umum bila ditinjau dari beban kerja tahun 2010 Direktorat Pratalak Tata Usaha Negara hanya memiliki beban kerja melakukan penelaahan berkas perkara sebanyak 1349 Berkas perkara, sedang pada tahun 2011 beban kerja menjadi 1396 berkas perkara. Ditinjau dari jumlah berkas perkara yang lengkap, berkas perkara Sengketa Pajak jumlahnya paling banyak disbanding dengan perkara-perkara Tata Usaha Negara lainnya, sehingga pada tahun 2012 mendatang akan diupayakan prioritas bimbingan peberkasannya perkara sengketa pajak.

5. PERKARA DARI PENGADILAN DILINGKUNGAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

a. Jumlah Total Perkara dari Pengadilan Dilingkungan Peradilan Militer Tahun 2010

Pengadilan	Sisa Awal Tahun 2010		Masuk Tahun 2010		Diputus Tahun 2010		Sisa Akhir Tahun 2010	
	Kjhn	Plgr	Kjhn	Plgr	Kjhn	Plgr	Kjhn	Plgr
Pengadilan Militer Utama	15	0	34	0	38	0	11	0
	0	-	1	-	1	-	0	-
Pengadilan Militer Tinggi	86	2	295	2	331	4	50	0
Pengadilan Militer	779	6	2524	332	2811	338	492	0
Jumlah	920	8	2854	334	3181	342	593	0

b. Perkara dari Pengadilan Dilingkungan Peradilan Militer Tahun 2011 per-akhir November 2011.

Pengadilan	Sisa Awal Tahun 2011		Masuk Tahun 2011		Diputus Tahun 2011		Sisa Akhir Tahun 2011	
	Kjhtn	Plgr	Kjhn	Plgr	Kjhtn	Plgr	Kjhtn	Plgr
Pengadilan Militer Utama	14	0	25	0	37	0	2	0
Pengadilan Militer Tingkat Banding	27	0	313	19	323	19	27	0
Pengadilan Militer	487	0	2610	322	2678	322	419	11
Jumlah	528	0	2978	341	3078	341	438	11

Dari kedua data perkara tersebut diatas, bila dibandingkan dengan tunggakan perkara pada tahun 2010 berjumlah 528, sedang pada tahun 2011 jumlah tunggakan perkara berjumlah 438, dengan demikian ada peningkatan mengatasi tunggakan perkara sebesar 528 perkara - 438 perkara = 90 Perkara atau ada peningkatan sebesar 90/438 atau 20,46%.

6. Daftar Rincian Perkara tahun 2011.

Pengadilan	Sisa Tahun 2010		Masuk Tahun 2011		Diputus Tahun 2011		Sisa Akhir Tahun 2011	
	Kjhn	Plgr	Kjhn	Plgr	Kjhn	Plgr	Kjhn	Plgr
Dilmiltama	11	0	18	0	28	0	1	0
	3		7		9		1	
Dilmilti I Medan	2	0	20	0	15	0	7	0
	0		91		88		3	
Dilmil I-01 Banda Aceh	34	0	171	19	159	19	61	0
Dilmil I-02 Medan	21	0	212	5	186	5	47	0
Dilmil I-03 Padang	40	0	117	3	130	3	17	0
Dilmil I-04 Palembang	35	0	174	17	164	17	45	0
Dilmil I-05 Pontianak	13	0	75	11	80	11	8	0
Dilmil I-06 Banjarmasin	7	0	35	0	34	0	8	0
Dilmil I-07 Balikpapan	19	0	69	11	82	11	6	0
Dilmilti II Jakarta	18	0	28	0	30	0	16	0
	0		84		84		0	
Dilmil II-08 Jakarta	72	0	333	59	343	59	62	0
Dilmil II-09 Bandung	38	0	269	11	274	11	33	0
Dilmil II-10 Semarang	3	0	85	8	78	8	10	0
Dilmil II-11 Yogyakarta	4	0	140	17	116	17	28	0
Dilmilti III Surabaya	4	0	12	19	16	19	0	0
	3		78		80		1	
Dilmil III-12 Surabaya	25	0	266	17	284	17	7	0
Dilmil III-13 Madiun	11	0	57	4	64	4	4	0
Dilmil III-14 Denpasar	3	0	39	7	39	7	3	0
Dilmil III-15 Kupang	6	0	44	2	42	2	8	0
Dilmil III-16 Makassar	49	0	193	57	206	57	36	0
Dilmil III-17 Manado	19	0	71	23	87	23	3	0
Dilmil III-18 Ambon	28	0	105	8	112	8	21	0
Dilmil III-19 Jayapura	60	0	155	39	198	39	17	0
Jumlah	487	0	2810	316	3078	341	419	0

7. Daftar Rincian Biaya Perkara dari masing-masing Pengadilan Militer.

Pengadilan	Jumlah Perkara Putus		Jumlah Biaya Perkara			
	Kejahatan	Pelanggaran	Kejahatan		Pelanggaran	
			Biaya	Denda	Biaya	Denda
Dilmiltama	-	-	-	-	-	--
Dilmilti I Medan	-	-	-	-	-	-
Dilmil I-01 Banda Aceh	14	5	Rp. 142.000	Rp.1.600.000	Rp. 42.500	Rp. 240.000
Dilmil I-02 Medan	6	nihil	Rp.44.000	Rp. 2.000.000	Rp. nihil	Rp. Nihil
Dilmil I-03 Padang	14	Nihil	Rp.110.000	Rp. Nihil	Rp. Nihil	Rp.Nihil
Dilmil I-04 Palembang	-	-	-	-	-	-
Dilmil I-05 Pontianak	6	Nihil	Rp.52.500	Rp17.000.000	Rp. Nihil	Rp.Nihil
Dilmil I-06 Banjarmasin	-	-	-	-	-	-
Dilmil I-07 Balikpapan	2	2	Rp. 5.000	Rp. Nihil	Rp. 15.000	200.000
Dilmilti II Jakarta	-	-	-	-	-	-
Dilmil II-08 Jakarta	26	Nihil	Rp.250.000	Rp. 750.000	Rp.Nihil	Rp.Nihil
Dilmil II-09 Bandung	13	1	Rp.250.000	Rp.Nihil	Rp.Nihil	Rp.Nihil
Dilmil II-10 Semarang	8	Nihil	Rp.65.000	Rp.Nihil	Rp. Nihil	Rp.Nihil
Dilmil II-11 Yogyakarta						
Dilmilti III Surabaya						
Dilmil III-12 Surabaya	29	1	Rp.220.000	Rp.1000.000	Rp.5.000	Rp.140.000
Dilmil III-13 Madiun	8	Nihil	Rp.95.000	Rp. Nihil	Rp.Nihil	Rp.Nihil
Dilmil III-14 Denpasar	6	Nihil	Rp. 60000	Nihil	Nihil	Nihil
Dilmil III-15 Kupang	4	Nihil	Rp. 42.500	Nihil	Nihil	Nihil
Dilmil III-16 Makassar	15	15	Rp.950.000	Nihil	Rp.120.000	Rp.1.220.000
Dilmil III-17 Manado	5	Nihil	Rp.32.500	Nihil	Nihil	Rp.300.000
Dilmil III-18 Ambon	9	Nihil	Rp.70.000	Nihil	Nihil	Nihil
Dilmil III-19 Jayapura	-	-	-	-	-	-
Jumlah	164	24	Rp.2.338.500	22.350.000	192.500	1.875.000

Perlu pula diketahui bahwa Pengadilan Militer Tidak mengelola biaya perkara, pengelolaan biaya perkara ada pada Oditurat militer.

8. Perkara dari Pengadilan Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2010

Pengadilan	Sisa Akhir Tahun 2009 Ggtn Bdg	Masuk Tahun 2010 Ggtn Bdg	Diputus Tahun 2010 Ggtn Bdg	Sisa Akhir Tahun 2010 Ggtn Bdg
Pengadilan TUN Tingkat Banding	116	819	747	188
PTUN Tingkat Pertama	420	1348	1433	435
Jumlah	536	2167	2180	623

9. Perkara dari Pengadilan Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2011 (per november 2011)

Pengadilan	Sisa Akhir Tahun 2010 Ggtn Bdg/Pmhn	Masuk Tahun 2011 Ggtn Bdg/Pmhn	Diputus Tahun 2011 Ggtn Bdg/Pmhn	Sisa Akhir Tahun 2011 Ggtn Bdg/Pmhn
Pengadilan TUN Tingkat Banding	188	675	699	164
Pengadilan TUN	435	1301	1287	449
Jumlah	623	1891	1986	612

Ditinjau dari jumlah perkara masuk dan jumlah putusan yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama maupun tingkat banding terlihat bahwa jumlah putusan yang dihasilkan melebihi dari jumlah perkara masuk, yakni jumlah perkara masuk secara keseluruhan berjumlah 1891 perkara, sedang jumlah putusan secara keseluruhan berjumlah 1986, pada tahun 2011 Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara telah dapat mengurangi jumlah tunggakan perkara sebesar 11 Perkara. Bila ditinjau jumlah putusan pada tahun 2010 yang berjumlah secara keseluruhan 2167 perkara, dan pada tahun 2011 secara keseluruhan berjumlah 1986 perkara, memang secara kuantitas jumlahnya lebih sedikit, namun demikian tingkat kesulitan penyelesaian perkara Tata Usaha Negara tahun 2010 dan tahun 2011, dapat dikatakan lebih sulit dari pada tingkat kesulitan penyelesaian perkara dibandingkan pada tahun sebelumnya, sehingga berdampak pada penurunan jumlah putusan yang dihasilkan.

10. Daftar Rincian Perkara dari masing-masing Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan	Sisa Akhir Tahun 2010		Masuk Tahun 2011		Diputus Tahun 2011		Sisa Akhir Tahun 2011	
	Ggtn	Bdg	Ggtn	Bdg	Ggt	Bdg	Ggtn	Bdg
PT TUN MEDAN	2	27	1	151	3	156	0	22
PTUN Banda Aceh	38		89		94		33	
PTUN Medan	6		15		12		9	
PTUN Padang	7		34		32		9	
PTUN Pekanbaru	30		53		58		25	
PTUN Jambi	3		15		12		6	
PTUN Bengkulu	8		12		17		3	
PTUN Palembang	12		48		36		24	
PTUN Bdr. Lampung	9		24		26		7	
PT. TUN JAKARTA	18	94	32	249	32	247	16	96
PTUN Jakarta	53		232		223		62	
PTUN Bandung	40		121		119		49	
PTUN Banjarmasin	9		27		24		12	
PTUN Pontianak	18		45		44		19	
PTUN Samarinda	18		35		42		11	

PTUN Palangkaraya	6		12		17		1	
PT. TUN SURABAYA	0	16	1	138	0	137	1	17
PTUN Surabaya	43		125		118		50	
PTUN Semarang	20		47		58		11	
PTUN Yogyakarta	2		15		14		3	
PTUN Denpasar	4		16		17		3	
PTUN Mataram	12		49		47		15	
PTUN Kupang	4		19		18		5	
PT. TUN MAKASSAR	0	31	0	105	0	124	0	12
PTUN Makassar	33		68		73		28	
PTUN Manado	20		46		47		19	
PTUN Kendari	7		27		21		13	
PTUN Palu	10		24		20		14	
PTUN Ambon	4		16		14		11	
PTUN Jayapura	19		60		57		18	
JUMLAH	435		1301		1287		448	

11. Daftar Penanganan Perkara dari Lingkungan Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Direktorat Pranata Tatalaksana perkara Militer dan Direktorat Pranata Tatalaksana Perkara TUN.

No.	Unit Pelaksana	Jumlah		Jumlah Keseluruhan
		Putusan Perkara	Penelaahan Berkas Perkara	
1.	Peradilan Militer	3497		3497
2.	Peradilan TUN	1986		1986
3.	Ditpratalak Militer		264	264
4.	Ditpratalak TUN		1396	1396
5	Jumlah Total			7153

Bila dikaitkan dengan Base line dalam Rencana Strategis dimana target yang direncanakan pertahun harus dapat memutus 5100 perkara, maka jumlah putusan yang dihasilkan oleh lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan berjumlah 5493 Perkara, perhitungan sampai pada bulan November 2011, ditambah dengan penelaahan berkas perkara sebanyak 1660 perkara yang ditelaah oleh Direktorat Pranata Tata Laksana Perkara Pidana Militer dan Direktorat Paranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara. Total Jumlah perkara yang ditangani berjumlah 7153 perkara, dan ini sudah sangat jauh melampaui baseline yang menjadi target dalam renstra Ditjen Badilmiltun.

12. Daftar Laporan Biaya Perkara dari lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara

	<u>Pengadilan TUN</u>	<u>Saldo Awal</u>	<u>Jml Masuk</u>	<u>Jml Kembali</u>	<u>Jml Keluar</u>	<u>Saldo Akhir</u>
1	PTTUN Medan					
2	PTUN Aceh	5.365.450	20.850.000	3.932.000	15.974.950	6.308.500
3	PTUN Medan	55.664.400	216.103.000	25.903.000	168.629.000	77.235.400
4	PTUN Pekanbaru	7.509.000	78.170.000	7.821.000	73.652.000	4.206.000
5	PTUN Palembang	19.899.275	130.550.000	15.392.000	110.626.500	24.430.775
6	PTUN Padang					
7	PTUN Jambi	6.183.200	21.435.700	5.156.500	12.902.700	9.559.700
8	PTUn Bengkulu	15.522.350	15.500.000	9.443.800	14.274.350	7.304.200
9	PTUN Bandar Lampung	4.303.000	23.680.000	5.018.000	18.410.000	4.555.000
10	PTTUN Jakarta	71.625.800	596.806.250	19.277.500	604.903.575	44.250.975
11	PTUN Jakarta	141.046.650	471.677.000	33.248.400	404.080.000	175.395.250
12	PTun Bandung	160.917.103.	311.460.000	37.652.000	248.298.100	186.427.003
13	PTUN Banjarmasin	25.703.730	74.514.200	8.042.335	56.233.740	35.941.855
14	PTUN Palangkaraya	18.200.950	59.958.100	12.782.700	46.795.300	18.581.050
15	PTUN Pontianak	13.517.715	113.103.500	6.614.000	105.414.705	14.592.510
16	PTUN Samarinda	37.195.175	131.945.720	11.978.490	109.950.320	47.212.085
17	PTTUN Surabaya	4.000.000.	36.500.000	0	35.500.000	5.000.000
18	PTUN Surabaya	63.188.050	220.600.750	37.672.500	169.795.500	76.320.800
19	PTUN Semarang					
20	PTUN Yogyakarta	4.836.490	14.700.000	1.119.000	13.412.500	5.004.990
21	PTUN Mataram	35.894.169	70.235.000	19.586.500	55.555.439	31.077.230
22	PTUN Denpasar	15.197.000	22.504.000	6.824.500	18.373.500	12.503.500
23	PTUN Kupang	10.418.100	40.200.000	7.673.000	30.334.400	12.610.700
24	PTTUN Makasar	8.847.100	34.450.000	2.150.000	34.500.000	6.647.100
25	PTUN Makasar	226.379.440	263.455.300	79.847.400	221.527.200	188.460.140
26	PTUN Manado	62.236.408	127.150.000	19.888.000	94.589.860	74.908.548
27	PTUN Kendari	21.609.550	73.700.000	5.373.000	57.211.000	32.725.550
28	PTUN Palu					
29	PTUN Ambon	13.975.300	49.037.100	1.911.800	37.833.795	23.266.805
30	PTUN Jayapura					
	TOTAL	1.049.235.405	3.218.376.120	384.307.425	2.758.778.434	1.124.525.666

H. Pengelolaan Keuangan

Pagu anggaran yang diberikan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam DIPA tahun anggaran 2011 sebesar Rp.14.259.500.000,-

Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun anggaran 2011 tergambar dalam matrikulasi sebagai berikut :

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	% REALISASI
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Pegawai	Rp. 5.154.549.000	Rp. 5.037.542.495	Rp 117.006.505	98
2.	Belanja Barang operasional	Rp. 2.215.170.000	Rp. 2.022.581.539	Rp. 192.588.461	88
3	Belanja Barang Non Operasional	Rp. 6.630.721.000	Rp.6.169.237.850	Rp. 461.483.150	92
4	Belanja Modal	Rp. . 259.060.000	RP. 229.471.000	Rp. 29.589.000	89
Jumlah		RP. 14.259.500.0000	RP.13.302.225.784	RP. 800.667.116	94,39

Ditinjau dari segi pagu anggaran dalam DIPA dan realisasi anggaran tahun 2010 yang lalu, dan dibandingkan pagu dalam DIPA dan realisasi tahun 2011, telah terjadi penurunan realisasi anggaran seperti yg diuraikan dibawah ini :

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI		% REALISASI	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Belanja Pegawai	4.007.417.000	5.154.549.000	4.348.675.716	5.037.542.495	108	97,73
2.	Belanja Barang Operasional	6.330.511.000	2.215.170.000	5.732.905.948	2.022.581.539	90,56	91,31
3	Belanja Barang Non Operasional	-----	6.630.721.000	-----	6.169.237.850	-----	93,04
4	Belanja Modal	2.500.000.000	259.060.000	2.108.309.555	229.471.000	84,33	88,58
Jumlah		12.837.928.000	14.259.500.0000	12.197.308.219	13.458.832.884	96,01	94,39

Target realisasi anggaran yang tertera dalam renstra Ditjen Badilmiltun untuk tahun anggaran 2011 adalah sebesar 92%, dengan adanya realisasi anggaran pada tahun 2012 sebesar 94,39% maka target tersebut telah dapat tercapai.